

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Abdul Azis, Lutfian Ubaidillah,
Universitas Muhammadiyah Jember
abdulazisrahman27@gmail.com¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²;

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi Program Koperasi Merah Putih (KMP) berdasarkan perspektif hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam program Koperasi Merah Putih bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam aspek pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, dan pengawasan koperasi, tetapi tidak berwenang melakukan pengelolaan internal koperasi karena pengelolaan merupakan hak anggota koperasi sebagai badan hukum privat. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan pemerintah daerah karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan program KMP harus tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun pelanggaran terhadap prinsip kemandirian koperasi.

Kata Kunci : kewenangan pemerintah daerah, pengawasan koperasi, Koperasi Merah Putih, otonomi daerah, hukum administrasi negara.

This study aims to analyze the authority of local governments in managing and supervising the Red and White Cooperative Program (KMP) based on the perspective of state administrative law and local government law. This study uses a normative juridical research method with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the authority of local governments in the Red and White Cooperative program is derived from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Local governments have authority in the aspects of fostering, empowering, facilitating, and supervising cooperatives, but are not authorized to carry out internal management of cooperatives because management is the right of cooperative members as private legal entities. Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of Red and White Village/Sub-District Cooperatives cannot be used as a basis for expanding local government authority because it is not included in the hierarchy of laws and regulations. Therefore, the implementation of the KMP program must remain guided by the